

# EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID- 19 OLEH DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Yakobus Marten Sandy Ladja

NPP. 29.1848

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: yakobusladja@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The distribution of Cash Social Assistance in the city of Jayapura experienced obstacles in the implementation of the distribution of Cash Social Assistance where, one of the problems was the impact of the implementation of PPKM in Jayapura City so that the implementation of the distribution of Cash Social Assistance was delayed in its implementation.

**Purpose:** So the purpose of this research is to see and find out the level of Effectiveness of Cash Social Assistance during the COVID-19 pandemic in Jayapura City, Papua Province, what are the inhibiting factors in the distribution of cash social assistance, and how the efforts of the Social Service in overcoming obstacles to the distribution of cash social assistance by Jayapura City Social Service, Papua Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. In collecting data, the researcher used interview, observation and documentation techniques. The theory used in this thesis is the theory of effectiveness proposed by Gibson and Steers (1985:46-48) in Sumaryadi . **Result:** The results of this study indicate that the effectiveness of the distribution of Cash Social Assistance by the Jayapura City Social Service has been running well. **Conclusion:** The effectiveness of the distribution of cash social assistance during the COVID-19 pandemic at the Jayapura City Social Service is quite effective.

**Keywords:** Effectiveness, Cash Social Assistance Program (BST), Covid 19.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di kota Jayapura mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut dimana, salah satu permasalahannya adalah dampak dari pemberlakuan PPKM di Kota Jayapura sehingga pelaksanaan dari penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut mengalami keterlambatan dalam waktu pelaksanaannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan mengetahui tingkat dari Efektifitas Bantuan Sosial Tunai dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Jayapura Provinsi Papua, apa saja Faktor penghambat dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, serta bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers (1985:46-48) dalam Sumaryadi (2005:107). Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 5 (lima) dimensi yaitu produksi atau produktivitas, mutu kualitas,

efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dari penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Jayapura sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut, yaitu adanya data BST yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Sosial ada, terdapat nama-nama para PNS di dalamnya sehingga inilah yang menjadi hambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai adapun kendala yang di hadapi Dinas Sosial Kota Jayapura bisa di atasi, melalui upaya-upaya yang dilakukan sehingga pelaksanaan dari Bantuan Sosial Tunai oleh Dinas Sosial Kota Jayapura dapat berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kota Jayapura terbilang sudah cukup Efektif.

**Kata kunci:** Efektivitas, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Covid-19.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada saat ini dunia telah diramaikan dengan COVID-19 atau yang dikenal sebagai pandemi virus corona. Virus ini pertama kali mewabah berasal dari wilayah Wuhan di China. Akhir tahun 2019 Virus Corona ini mulai menyebar hampir keseluruh negara. Awal kemunculan virus ini diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala yang mana serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Kondisi darurat ini pertama terjadi pada pasien dengan masalah Kesehatan sebelumnya. Virus ini juga dapat menular dengan mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik, yang mana untuk dapat menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Dimana karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total atau yang bisa di sebut juga dengan karantina. (Mona, 2020).

Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggaran mengenai protokol Kesehatan. Yang mana Juru Bicara Presiden Jokowi dodo Bidang Hukum, Dini Purwono menjelaskan, didalam Inpres Alinea ke 4, diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi COVID-19, serta dimana dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol Kesehatan yang sudah di tetapkan. Dari Inpres ini kita bisa melihat bahwa keseriusan pemerintah untuk menekankan angka penyebaran COVID-19.

Dini mengatakan dalam Inpres itu, “Presiden menginstruksikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjamin kepastian hukum.” Kemudian memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19 di seluruh daerah Indonesia. Dini juga menuturkan bahwa, Inpres ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memastikan sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan menetapkan kewajiban masyarakat untuk memenuhi protokol Kesehatan. Sekaligus, menetapkan sanksi bagi pelanggar. Sanksi juga dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. <https://www.liputan6.com> Di akses tertangga 30 Agustus 2021 melalui Inmendagri 25 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, membuka mata tentang keyataan pandemi COVID-19 yang mengganas dan menyelimuti bumi Nusantara, dimana Instruksi Kemendagri ini menjadi tantangan buat Pemerintah Daerah dan jajarannya untuk menghadapi kenyataan ini. Masyarakat masih tetap perlu diberikan bimbingan dan edukasi serta apapun namanya untuk Bersama-

sama keluar dari permasalahan berat ini. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) di wilayah yang telah ditetapkan Inmendagri. Didalam Inmendagri bagian ketiga, poin D, pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum: 1) “warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.” <https://www.jogloabang.com> Di akses tertanggal 30 Agustus 2021.

Pemerintah Kota Jayapura sendiri resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini dilatari karena melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Jayapura. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Bersama antara Pemerintah Kota Jayapura Bersama tim Satgas COVID-19 dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta paguyuban warga di Jayapura. Beberapa poin yang mencakup dalam rapat tersebut, salah satunya adalah pembatasan aktivitas warga di luar rumah, yakni hanya dilakukan dari pukul 06.00 hingga pukul 20.00 WIT. Hingga akhirnya membawah dampak bagi perekonomian masyarakat di Kota Jayapura khususnya bagi pelaku-pelaku usaha kecil yang mana pelaku usaha di Kota Jayapura, dimana mereka mengalami penurunan penghasilan sejak dilakukan pemberlakuan aktifitas masyarakat. Sebelumnya di Kota Jayapura menerapkan Keputusan PPKM Berbasis Mikro, salah satu keputusan adalah membatasi aktivitas masyarakat dengan hanya memperbolehkan aktivitas dari pukul 6 pagi sampai 8 malam, hal itu bertujuan untuk menekan jumlah kasus baru COVID-19 di Kota Jayapura.

Namun semua keputusan yang dilakukan memang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya para pedagang di Kota Jayapura. Seperti halnya Pedagang Roti Bakar, Arum Sari yang hanya menjual Ketika saat memasuki waktu magrib 8 malam, sehingga berdampak pada pendapatan penjualannya. Sebetulnya ini harus di perbaiki lagi, bagaimana baiknya, kami pedagang yang hanya berjualan Ketika malam, mengalami penurunan, kadang bisa 30 roti yang laku, tapi dengan adanya PPKM, hanya 15 bahkan kurang dari itu. Bukan hanya itu, dengan adanya PPKM hanya bisa menjual 4 jam saja, dan apabila ada petugas yang melakukan patroli, terpaksa untuk menutupnya. Sari berharap semoga situasi ini cepat membaik, apalagi nantinya dengan adanya PON XX di Papua, semua bisa kembali normal lagi. <https://rri.co.id/jayapura/ekonomi>. Di akses tertanggal 30 Agustus 2021.

Tidak hanya sampai disitu, pemberlakuan PPKM ini juga berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Pemerintah Kota Jayapura tak memungkiri dampak pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) level IV, yang berimbas juga terhadap pendapatan asli daerah. Selama bulan April, Mei dan Juni Pendapatan asli daerah (PAD) sempat mengalami kenaikan hingga 25 % namun memasuki bulan Juli dan Agustus 2021 mengalami penurunan yang signifikan hebatnya. Hal itu dikarenakan pembatasan waktu aktifitas warga termasuk pelaku usaha akibat meningkatnya jumlah kasus covid 19 di wilayah Kota Jayapura. <https://kilaspapua.com> Di akses tertanggal 31 Agustus 2021. Dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri hampir mencakup sektor yang terkena dampak tersebut tak hanya di Kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi ini, pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah pada aktivitas bisnis, yang kemudian berpengaruh pada sector perekonomian.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam hal ini Pemerintah menggelontarkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Banyak program inovatif yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia yaitu pandemi COVID-19. Masalah mendasar selama pandemi COVID-19 ini adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah hadir dengan berbagai program yang coba menyentuh

langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial akibat pandemi COVID-19. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.695,2 triliun dalam menangani pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dana itu dikucurkan untuk berbagai sector, salah satunya untuk bansos sebesar Rp.203,9 triliun. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako untuk meredakan masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Melalui berbagai proses dan perencanaan yang matang sehingga menjadi solusi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat dan juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu Program Jaring Pengaman sosial yaitu Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang dan diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan yang rentan terkena dampak akibat dari wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Fakir Miskin No 18/6/Sk/Hk/02.02/4/2020 Tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona (Covid-19). Jumlah KPM Bantuan Sosial Tunai sebesar 9 juta kepala keluarga untuk seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Papua sendiri khususnya di kota Jayapura, Dinas Sosial langsung merespon program tersebut dan menyalurkan kepada masyarakat yang berdampak pandemi COVID-19, dimana program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Non PKH.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Evan Fransisco, 2020 Analisis pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sosial tunai dalam Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode penelitian kualitatif dengan Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan pelaksanaan belum efektif dan maksimal karena ada beberapa penanggulangan pandemic covid-19 di kabupaten jayawijaya. menggunakan metode deskriptif Aspek yang tidak berjalan seperti sarana prasarana yang masih kurang. Noni Noerkaisar, 2021 Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk mengatasi dampak covid- 19 di Indonesia Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif Penulis menyimpulkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sampai saat ini belum efektif masih terdapat permasalahan yang ditemui yaitu terkait validitas data penerima menjadi tumpuhan dalam penyaluran beragam skenario bantuan sosial.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai penyaluran bantuan sosial tunai pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kota Jayapura yang belum dilakukan oleh orang lain. Selain itu penulis hanya ingin mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran bantuan sosial tunai tanpa melakukan analisis pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sosial tunai seperti yang dilakukan oleh Evan Fransico (Fransico,2020). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang sama

dengan peneliti Evan Fransico dan Noni Noerkaisar. Penulis juga menggunakan teori dari Gibson dan Steers dalam mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan sosial tunai di Dinas Sosial Kota Jayapura Provinsi Papua.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari riset terapan pemerintahan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan guna menjawab informasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) program Kementerian Sosial di Kota Jayapura dengan tujuan Untuk mengetahui tingkat Efektifitas Bantuan Sosial Tunai dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Jayapura Provinsi Papua, Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Program Kementerian Sosial di Kota Jayapura Provinsi Papua, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam Menghadapi hambatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Jayapura Provinsi Papua.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers (1985:46-48) dalam Sumaryadi (2005:107). Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 5 (lima) dimensi yaitu produksi atau produktivitas, mutu kualitas, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti.

### **3.1. Analisis Fokus Penelitian dari perspektif Teoritis**

Efektivitas merupakan kemampuan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa menggagalkan cara dan sumber daya serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaanya (Steers1985:87).

Berdasarkan penjelasan Steers tersebut, efektivitas merupakan suatu konsep menggambarkan besarnya harapan dan hasil yang di harapkan dari suatu program dengan keadaan nyata/fakta di lapangan yang sudah tercapai. Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai dimasa pandemi COVID-19 di Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan lima indikator ukuran efektivitas teori Gibson dan Steers, yakni :

1. Produksi atau produktivitas
2. Mutu/kualitas
3. Efisiensi
4. Fleksibilitas
5. Kepuasan

Mengukur seberapa jauh Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kota Jayapura dimasa pandemi COVID-19, penulis menggunakan kelima ukuran efektivitas tersebut menurut pendapat Steers (1985:87). Penulis melakukan observasi secara langsung melalui pelaksanaan Penelitian di Dinas Sosial Kota

Jayapura yang merupakan sasaran tempat pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Kota Jayapura. Dimana guna untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Jayapura.

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari virus COVID-19. Bantuan ini diberikan kepada 10 juta KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp.300.000/bulan yang diberikan selama 4 bulan yaitu mulai dari bulan Januari sampai bulan April Tahun 2021. Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos. Penyaluran yakni dengan penyaluran uang tunai yang dikelola oleh PT.POS Indonesia dan bagi KPM yang memiliki rekening disalurkan melalui transfer oleh Bank Milik Negara (HIMBARA) Hal ini mampu mendorong Dinas Sosia Kota Jayapura untuk dapat melakukan dan menyalurkan bantuan-bantuan dalam penanganan dimasa COVID-19. Bantuan ini hanya diberikan terhadap Keluarga Miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah COVID-19 Dengan nilai bantuan sebesar Rp 300.000/bulan.

Pernyataan diatas juga di perkuat sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura H.Irawadi, SH, M.Si tanggal 18 Januari 2022 pukul 10:45 WIT, dimana beliau menyampaikan :

“Salah satu bantuan untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan Bantuan Sosial Tunai yang di berikan oleh dinas sosial untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19 adalah Pemerintah memberikan atau membuat Program berupa Bantuan Sosial Tunai dari banyaknya progam bantuan-bantuan yang ada untuk membantu para keluarga miskin, untuk dapat menerima bantuan dari Pemerintah. Bantuan ini di berikan kepada keluarga miskin, tidak mampu sebesar Rp 300.000/bulan yang diberikan selama 4 bulan yaitu mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Dengan bantuan dari pemerintah ini masyarakat yang kurang mampu yang terkena dampak COVID-19 dapat terbantu dan mereka dapat memenuhi kebutuhan yang sulit didapatkan karena posisi pandemi seperti saat ini.”

Progam bantuan sosial tunai ini hanya dikhususkan bagi masyarakat miskin di Kota Jayapura dan tidak terdaftar di bantuan-bantuan yang lain. yang mana Program ini baru dilaksanakan sejak pandemi COVID-19 dengan Sasaran pada masyarakat yang miskin yang mana terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini sudah dilaksanakan hampir diseluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Jayapura dengan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021. Namun masih ada masyarakat yang belum menerima Bantuan Sosial Tunai, karena data yang di berikan adalah datanya di serahkan langsung dari pusat Sehingga ada nama-nama yang terdata didalamnya seperti PNS, yang seharusnya tidak masuk dalam daftar Bantuan Sosial Tunai tersebut.

Yang mana hal ini juga didukung dengan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura H.Irawadi, SH, M,Si tanggal 18 Januari 2022, beliau menyampikan bahwa:

“Program Bantuan Sosial Tunai dalam pelaksanaannya hanya diperuntukan bagi keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah COVID-19. Yang mana dalam pelaksanaan Program ini belum dilaksanakan secara optimal karena masih banyaknya kesalahan dari data pusat ke daerah yaitu data yang diberikan dari pusat tidak sesuai dengan nama-nama penerima, yang mana ada nama para Pns di dalamnya, sehingga Dinas Sosial memperbaiki dan memperbarui data lagi. Hal tersebut inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang belum menerima hak dari bantuan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai ini belum berjalan secara optimal. Dengan maksimalkan data yang masuk dan selalu memperbarui data yang sudah ada akan membuat masyarakat yang seharusnya menerima hak bantuan tersebut akan mencapai sasaran yang tepat. Dan hasilnya adalah seluruh masyarakat Kota Jayapura terkhususnya untuk keluarga miskin, tidak mampu atau yang rentan, bisa mendapatkan haknya untuk menerima Bantuan Sosial Tunai secara/Keseluruhan.

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai melalui indikator efektivitas menurut teori Gibson, at, all. (1996:50-52) dan Steers (1985:46-68) dalam Sumaryadi (2005:107), yakni:

### **3.2. Produksi atau Produktivitas**

Kemampuan Dinas Sosial Kota Jayapura dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai dimasa Pandemi COVID-19 merupakan ukuran Produktivitas dalam upaya penanganan COVID-19 Di Kota Jayapura yang dapat dinilai dari prosedur layanan, jumlah penerima bantuan, sosialisasi terkait Program dan Mutu Program Bantuan Sosial Tunai apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Menurut pandangan Steers (1985:46-48) menyatakan bahwa “Produktivitas merupakan kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan oleh organisasi.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura H. Irawadi, SH, M,Si diruang kerjanya pada tanggal 18 januari 2022 pukul 10:45 WIT, beliau mengatakn bahwa:

“Untuk kemampuan Dinas Sosial Kota Jayapura dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) saya rasa sudah mampu karena program ini juga di laksanakan dengan pengambilan ke kantor pos dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan oleh penulis yang dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ibu Milkha Hassor tanggal 13 Januari 2022 pukul 10.10 WIT dimana beliau mengatakan bahwa:

“Jika berbicara tentang indikator yang anda sampaikan berupa Produksi dan Produktivitas ini saya rasa sebenarnya sudah terpenuhi skali karena ini merupakan program dari Kementerian Sosial dan semua persiapan dan peralatan serta bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini mulai dari Kementerian Sosia itu sendiri, sudah berjalan dengan baik, sehingga kami hanya melaksanakan program yang diberikan oleh Kementerian Sosial tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis Menyimpulkan bahwa kedua wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari indikator Produksi dan Produktivitas dengan maksimalkan data yang masuk dan selalu memperbarui data yang sudah ada akan membuat

masyarakat yang seharusnya menerima hak bantuan tersebut akan mencapai sasaran yang tepat. Dan hasilnya adalah seluruh masyarakat Kota Jayapura terkhususnya untuk keluarga miskin, tidak mampu atau yang rentan, bisa mendapatkan haknya untuk menerima Bantuan Sosial Tunai secara/Keseluruhan.

### **3.3. Mutu Kualitas**

Menurut Steers (1985:46-48), “Mutu atau kualitas adalah kualitas dari jasa atau produk primer yang di hasilkan oleh organisasi.” Salah satu indikator dari pengukuran efektivitas program Bantuan Sosial adalah melalui mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Dapat ditinjau dari aspek kualitas sumber daya manusia atau kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Program Bantuan Sosial Tunai.

Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting untuk menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih berkualitas. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai, merupakan tenaga aparatur yang memahami bidang tersebut.

Sehingga dalam proses pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai tidak menjadi kendala, sehingga wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ibu Milkha Hassor tanggal 13 Januari 2022 pukul 10.10 WIT beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh pegawai yang telah kami bentuk, sehingga petugas yang terlibat tentunya sudah memahami betul segala jenis kendala ataupun teknis dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai itu sendiri. Sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya.”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari salah satu konsumen program Bantuan Sosial Tunai yakni bapak Soleman Norotouw tanggal 12 Januari 2021 pukul 18 : 45 WIT:

“Penjelasan tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk Bantuan Sosial Tunai dari petugas cukup jelas sehingga kami dapat memahaminya dan penyampaianya juga mempunyai sikap yang sangat ramah dan sopan terhadap kami, sehingga kami sebagai masyarakat sangat puas karena mereka dengan tenang dan gigih untuk membantu kami agar masuk dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi ini.

Sikap petugas pelayanan juga ramah, tenang dan juga talenta Ketika memberikan penjelasan tentang persyaratan yang di butuhkan oleh pihak pemohon. Banyak pemohon Ketika pengembalian berkas Program Bantuan Sosial Tunai dan di adakan pengecekan ulang kelengkapan berkas oleh petugas dimana hasilnya adalah semua berkas persyaratan yang dibutuhkan dinyatakan lengkap dan sudah bisa di proses pada saat hari itu juga.

Sehingga, penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan observasi penulis yang didukung oleh persyaratan wawancara dari beberapa pihak bahwa mutu atau kualitas dari pegawai dan petugas Bantuan Sosial Tunai sudah baik karena masyarakat merasa puas dan senang. Hal ini juga berpengaruh terhadap output berupa kelengkapan berkas pengajuan penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber dan di dukung dengan observasi yang penulis lakukan selama kegiatan penelitian di tempat pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai, menyimpulkan bahwa kualitas pegawai Dinas Sosial Kota Jayapura, terkhususnya pegawai/petugas yang bertugas dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai sudah sangat baik.

Hal ini di pengaruhi dari pegawai yang bertugas dibagiannya masing-masing sudah memiliki jam kerja yang sangat tinggi, yakni rata-rata sudah berada pada bagian kerjanya lebih dari satu tahun. Sehingga kemampuan keterampilan dan pengalaman dalam menangani dokumen Bantuan Sosial sudah sangat cakap dan dalam proses kerjanya seperti input data bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Jayapura Ibu Yani Rumbiak di ruang kerjanya pada tanggal 18 Januari 2022 Pukul 12:08 WIT, dimana beliau mengatakan bahwa:

“mutu dan kualitas kalau mengenai program, saya rasa sudah sangat berarti dan berkaitan dengan kesiapan Dinas Sosial dalam pengkordinasian Bantuan Sosial Tunai ini, yang mana di lakukan oleh dinas sosial dan Kantor Pos Indonesia dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai yang di lakukan oleh Dinas Sosial dan Kantor Pos Indonesia sudah mencapai Mutu dan Kualitas yang sangat baik.

### 3.4. Efisiensi

Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kota Jayapura pada masa Pandemi COVID-19, dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diatur oleh kementerian Sosial. Pelaksanaanya atau penyalurannya di lakukan perbulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April.

Program Bantuan Sosia Tunai di Kota Jayapura di bagi dalam dua metode penyaluran kepada masyarakat yaitu sebagai betrikut:

1. Penyaluran di kantor Pos Kota Jayapura
2. Penyaluran langsung kepada masing-masing rekening penerima.
3. Penyaluran kepada masyarakat di tiap-tiap titik yang ada di 5 (lima) distrik di Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasie Pelayanan dan Rehabilitas cacat dan tuna Sosial Ibu Devi Dawir, SE di ruang kerjanya pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 10:40 WIT, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara soal efisiensi saya rasa kami sudah sangat baik dimana kami mendapatkan apresiasi dari Walikota kota Jayapura dalam percepatan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dimasa pandemi COVID-19 ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ibu Milkha Hassor tanggal 13 Januari 2022 pukul 10.10 WIT beliau mengatakan bahwa: “Tentang efisiensi pelaksanaan saya rasa kami melaksanakannya tepat waktu, dan juga tepat sasaran walaupun ada beberapa kendala yang mana, terjadi tumpukan nama pada data Bantuan Sosial Tunai tersebut, sehingga kami Dinas Sosial harus memperbaiki dan memperbaruhinya lagi, sehingga datanya valid dan masyarakat yang belum terdata, bisa terdata Kembali dan bisa menerima Bantuan Sosial Tunai tersebut.”

Disini penulis menyimpulkan bahwa dari indikator efisiensi Dinas Sosial Kota Jayapura mampu mengatasi kendala yang ada, dengan sikap yang tanggap dalam setiap kegiatan tersebut, sehingga proses penyaluran Bantua Sosial Tunai tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tepat waktu. Berikut ini penulis akan menampilkan jumlah data yang menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai perdistrik di Kota Jayapura.

Tabel 4.4

Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai perdistrik

No.	Lima Distrik di Kota Jayapura	Jumlah Penerima
(1)	(2)	(3)
1.	Abepura	766 orang

- |    |                  |           |
|----|------------------|-----------|
| 2. | Heram            | 854 orang |
| 3. | Jayapura Selatan | 789 orang |
| 4. | Muara tami       | 592 orang |
| 5. | Jayapura utara   | 739 orang |

Sumber: Data penerima program bantuan sosial Tunai,2021

### 3.5. Fleksibilitas

Menurut Gibson dan Steers dalam Sumaryadi (2005:107) menjelaskan Fleksibilitas adalah menyangkut tentang kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan pelayanan yang baru dan berbeda.

Dalam menganalisis indikator Fleksibilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura dimasa pandemi COVID-19 ini penulis merasa bangga dan memberikan apresiasi karena kesigapan dan kesiapan Dinas Sosial Kota Jayapura dalam Proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini bisa langsung di berikan oleh Walikota Jayapura kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai, melalui Kantor Pos Indonesia di kota jayapura.

Dan juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ibu Milkha Hassor tanggal 13 Januari 2022 pukul 10.10 WIT beliau mengatakan bahwa:

“Kalau Fleksibilitas saya rasa dari penjelasan akan keputusan kami untuk Penyerahaan langsung oleh Walikota Jayapura melalui kantor Pos, saya rasa itu sudah sangat menerangkan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai ini kami sudah sangat fleksibel terutama juga dalam kesiapan dan kesigapan Dinas Sosial dalam menyalurkan Bantuan Sosial tunai.”

Disini penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sekali lagi mereka memenuhi indikator yang penulis menilai yaitu Fleksibilitas, dimana kemampuan Dinas Sosial dalam menanggapi Bantuan Sosial Tunai tersebut dan menyalurkannya kepada masyarakat.

### 3.6. Kepuasan

Berikut ini penulis akan menampilkan pernyataan dari salah satu masyarakat yang sebagai konsumen program Bantuan Sosial Tunai yakni Ibu Wati Maniani, tanggal 1 April 2022 pukul 7 : 35 WIB beliau mengatakan bahwa:

“Dengan Bantuan Sosial Tunai ini, kami ibu-ibu sangat merasa puas dengan bantuan yang kami dapat, sangat membantu kami, untuk kebutuhan rumah tangga kami, kebutuhan anak-anak, sehingga itu sangat membantu kami. Jadi dengan bantuan itu, kami sangat puas skali, dengan bantuan yang diberikan dari pemerintah”.

Berdasarkan wawancara yang ke dua, dilakukan oleh penulis dengan Bapak Korneles Karubaba, sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai tanggal 1 April 2022 pukul 7 : 50 WIB beliau mengatakan bahwa:

“yaa.. bapa sangat bersyukur untuk program pemerintah dalam membantu kami, terutama yang ekonomi kecil, yang mana kami juga sangat bersyukur, untuk membantu kami untuk kelangsungan kehidupan. Walaupun mungkin pertriwulan tetapi kami juga merasa puas, karna dapat perhatian dari pemerintah, untuk kita keluarga-keluarga, baikpun secara umum dan secara tertentu. Jadi kami juga bukan lihat dari nilainya tapi, kita bersyukur bisa dapat perhatian dari bapak Presiden Jokowi kepada

kami masyarakat Indonesia secara khusus kami di Papua itu sangat luar biasa, dan itu juga menolong kami untuk kelangsungan kehidupan kita”.

Kemudian pada Saat penulis melaksanakan Penelitian di Pemerintahan, semua masyarakat memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial kota Jayapura dimana karena kegigihan dan kinerja Dinas dalam menghadapi situasi Darurat/luarbiasa yaitu pandemi COVID-19 ini.

Berikut ini adalah beberapa Kepuasan dan Apresiasi yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Jayapura dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai:

1. Apresiasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang dimana di berikan Langsung oleh Bapak Walikota kepada masyarakat melalui Kantor Pos Indonesia di Kota Jayapura.
2. Apresiasi dalam mengupayakan pengimputan data untuk masyarakat dapat masuk dalam daftar penerima yang mana pada Bulan Januari sampai Bulan April telah masuk semua dalam daftar penerima.

### **3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Upaya Dinas Sosial Dalam Mengatasi Hambatan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Kepala Dinas Sosial kota Jayapura H.Irawadi, SH, M.Si tanggal 18 Januari 2022 pukul 10:45 WIT, dimana beliau mengatakan bahwa:

“upaya kami dalam menghadapi hambatan tersebut ialah, kami berpegang pada tekad untuk tetap berusaha dan mengoptimalkan data yang di berikan oleh pusat supaya bisa dapat disalurkan kepada masyarakat pada bulan Januari sampai dengan bulan April nantinya.”

kami terus memperbaiki dan mengajukan data yang diberikan oleh pusat untuk masyarakat yang belum terdata dan yang belum masuk dalam daftar sebagai penerima, sehingga dengan perbaikan dan pengajuan data yang kami lakukan, setiap masyarakat bisa terdata dan bisa mendapatkan penerimaan Bantuan Sosial Tunai tersebut..

## **IV. KESIMPULAN**

Pada akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kota Jayapura. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data di atas, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas program Bantuan Sosial Tunai sudah sesuai dengan teori efektivitas dengan 5 (lima) indikator yakni Produktivitas, Mutu/kualitas, Efisiensi, Fleksibilitas, dan Kepuasan semua telah menacapai penilaian efektif karena pertama kesigapan pegawai yang berkompeten, sarana prasarana untuk menjadi pendukung dalam mengimput data dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini, dimana ketepatan waktu pelaksanaan program yang baik dan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya yang diatur oleh Kementerian Sosial.
2. Faktor-faktor penghambat, dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai di Dinas Sosial kota Jayapura ini yakni, masih adanya kesalahan data Bantuan Sosial Tunai dari pusat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu, belum terdaftar namanya sebagai penerima BST.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jayapura dalam menghadapi hambatan yang timbul adalah dengan terus memperbaiki dan mengajukan masyarakat yang sebagai penerima, tetapi yang belum juga terdata namanya, sehingga yang nantinya nama-nama tersebut dapat masuk dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai dimasa pandemi yang di berikan oleh kementerian Sosial.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Dinas yaitu Dinas Sosial Kota Jayapura sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Gibson dan Steers.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyarankan agar penelitian yang di lakukan lebih terfokus lagi pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Dinas Sosial Kota Jayapura, agar menemukan hasil yang lebih efektif.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2006). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka

Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Inc.: Boston London.

Creswell, John W. 2014. *Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : Edisi Indonesia

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beall, J., & Piron, LH (2005). *Tinjauan pengecualian sosial DFID*. London: Institut Pengembangan Luar Negeri, 32, 37.

Gibson, James L. et al. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.

Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Age International.

Mona, N. (2020). Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek menular (kasus penyebaran virus corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* , 2 (2).

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Marczyk, Geoffrey, Dematteo and Festinger. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

McDurry, Janice. 1999. *Collaborative Group Analysis of Data*. New Zealand: Otago Polytechnic Dunedin

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI - Press.

Ravianto, 1989. *Produktivitas dan Seni Usaha*. PT. Binaman Teknik Aksara. Jakarta

Simangunsong Fernandes. 2016. *Kapita Selekta Kepegawaian Indonesia*. Bandung: Buku Literatur IPDN.

Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.

Steers, Richard.M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (8th ed.)*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, Nyoman I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.

## B. Sumber Lainnya

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>

<https://rri.co.id/jayapura/ekonomi/1140089/dampak-ppkm-level-4-pendapatan-pedagang-anjlok>

<https://www.jogloabang.com/kesehatan/inmendagri-25-2021-ppkm-level-4-covid-19-wilayah-sumatera-kalimantan-sulawesi-nusa>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi><https://pendidikan.co.id/10pe> ngertian-sosial-dan-  
unsur-menurut-para-ahli/

<https://papua.antaraneews.com/berita/645178/dinsos-kota-jayapura-berharap-warga-belum-terdata-bansos-dapat-diakomodir>

